



**H. BAMBANG PU DJIONO, SH.
BUPATI GROBOGAN**



**H. ICEK BASKORO, SH.
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN
Pemerintahan Daerah (ILPPD)
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2008**

I. PENDAHULUAN

Sebagai perwujudan atas prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, kepala daerah berkewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik kepada Pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maupun kepada masyarakat.

Laporan dimaksud dalam bentuk LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) disampaikan kepada Pemerintah, LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) kepada DPRD, serta Informasi LPPD (Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) disampaikan kepada masyarakat.

Informasi LPPD yang disampaikan kepada masyarakat merupakan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), yang memuat :

- (1) Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan.
- (2) Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, baik yang diterima dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi.
- (3) Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Sejalan dengan uraian di atas, bahwa penyusunan Informasi LPPD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 ini, dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan pada Tahun Anggaran 2008, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun Anggaran 2008 dimaksud.

Tanggapan dan/atau saran itu oleh pemerintah daerah selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program kerja dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan dan/atau saran itu disampaikan kepada kepala daerah dengan tembusan DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah informasi LPPD disampaikan.

A. DASAR HUKUM

- (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- (2) PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat.
- (3) PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 dan Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (4) Surat MENDAGRI tanggal 8 Mei 2007 Nomor 188.32.04/558-DV perihal PERMENDAGRI Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Kabupaten Grobogan secara geografis terletak di antara 110°15' BT – 111°25' BT dan 7° LS - 7°30' LS. Dengan kondisi tanah, sebagian berupa daerah pengunungan kapur dan perbukitan, serta di bagian tengah berupa dataran. Terletak di antara 2 (dua) pegunungan yaitu Kendeng Utara dan Selatan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan Demak, di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Blora dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Sragen, Semarang dan Kabupaten Ngawi.

Luas wilayah 1.975,86 km² atau 197.586,420 Ha, dengan jumlah penduduk pada Tahun 2008 sebanyak 1.395.709 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 690.955 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 704.754 jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 706 jiwa/km², dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,62%.

Secara administrasi, terdiri dari 19 Kecamatan, 280 Desa/Kelurahan dan 1.451 Dusun, dengan potensi unggulan daerah berupa Padi, Jagung, Buah Melon, Industri Genteng Press, Batu Kapur dan Furniture.

Tingkat pendidikan masyarakat, berdasarkan jumlah penduduk usia di atas 5 tahun, bahwa tamatan SD/ sederajat menduduki peringkat yang tertinggi yaitu sebanyak 498.678 jiwa, sedangkan tidak atau belum tamat SD sebanyak 463.581 jiwa, tamat SLTP/ sederajat sebanyak 196.421 jiwa, tamat SMU/ sederajat sebanyak 109.740 jiwa, dan Diploma, S1, S2, dan S3 sebanyak 25.244 jiwa.

Jumlah penduduk miskin pada Tahun 2008 mengalami penurunan, apabila dibandingkan tahun 2007. Tercatat jumlah penduduk miskin tahun 2008 sebanyak 462.297 jiwa, sedangkan tahun 2007 sebanyak 552.557 jiwa.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Grobogan dicerminkan dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku.

Pada Tahun 2008 bahwa PDRB atas dasar harga konstan terhitung mengalami pertumbuhan positif sebesar 4,05%. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku, terhitung mengalami pertumbuhan positif sebesar 16,91%.

Adapun pertumbuhan PDRB perkapita Kabupaten Grobogan Tahun 2008 mengalami kenaikan dibandingkan dengan PDRB perkapita Tahun 2007, baik dihitung dari atas dasar Harga Konstan maupun atas dasar Harga Berlaku.

Terhitung bahwa PDRB perkapita (atas dasar harga konstan) Tahun 2007 sebesar Rp. 2.024.363,- dan Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 2.752.724,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 728.361,- atau 35,9%. Sedangkan PDRB perkapita (atas dasar harga berlaku) pada Tahun 2007 adalah sebesar Rp. 3.295.927,- dan Tahun 2008 adalah sebesar Rp. 3.829.942,- yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp. 534.015,- atau 16,2%.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan masyarakat, pada umumnya dilihat dari indikator nilai Indeks Gini Ratio dan Proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah sebagaimana Kriteria Bank Dunia.

Berdasarkan kedua indikator distribusi pendapatan masyarakat tersebut, dari Tahun 2006 s/d 2008 Kabupaten Grobogan berada pada kategori tidak timpang (low inequality). Hal ini dibuktikan dengan angka Indeks Gini Ratio dari Tahun 2006 s/d Tahun 2008 yang masih di bawah batas indeks yang ditetapkan yaitu sebesar 0,35. Terhitung bahwa Indeks Gini Ratio pada Tahun 2006 sebesar 0,2153 Tahun 2007 sebesar 0,2194 dan Tahun 2008 sebesar 0,2249.

Demikian juga dilihat dari indikator Proporsi pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan terendah, dimana pada Tahun 2006 tercatat sebesar 27,5%, Tahun 2007 tercatat sebesar 27,06% dan Tahun 2008 tercatat sebesar 27,07%, yang berarti bahwa 40% penduduk berpendapatan terendah masih menikmati bagian pendapatan sekitar 27%, jauh di atas batas ketimpangan 17%. Jadi, ketimpangan distribusi pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia masih dikategorikan rendah.

C. KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008 didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Sedangkan penyusunan teknis APBD didasarkan pada Permendagri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2008.

Penetapan APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008 dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, sedangkan perubahan APBD dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008.

Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah, kebijakan anggaran APBD Tahun Anggaran 2008 dilaksanakan berdasarkan prinsip Kedilan, Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin, Transparansi, serta Akuntabilitas.

1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

a) Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 mencapai sebesar Rp. 761.952.744.617,- atau 94%, dari target pendapatan sebesar Rp. 808.090.315.000,-. Sumbangan terbesar Pendapatan Daerah masih berasal dari Dana Perimbangan yaitu sebesar Rp. 638.907.004.165,- atau 83,85% dari total Pendapatan Daerah. Pendapatan Asli Daerah Tahun 2008 hanya memberikan kontribusi sebesar Rp. 59.069.284.723,- atau 7,75% dari total Pendapatan Daerah.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Grobogan TA. 2008

No	PENDAPATAN DAERAH	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	Persen (%)
1	2	3	4	5
A	Pendapatan Asli Daerah	50.721.201.000	59.069.284.723	116,46
1	Pajak Daerah	9.447.600.000	9.951.657.506	105,34
2	Retribusi Daerah	30.373.526.000	27.572.305.573	90,78
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	2.494.949.000	2.312.401.705	92,68
4	Lain-lain PAD yang sah	8.405.126.000	19.232.919.939	228,82
B	Dana Perimbangan	697.282.658.000	638.907.004.165	91,63
1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	62.275.157.000	4.310.124.365	6,92
2	DAU	615.030.000.000	615.030.004.000	100
3	DAK	10.325.000.000	10.325.000.000	100
4	Dana Tunjangan Pendidikan	9.652.501.000	9.241.875.800	95,75
C	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	60.086.456.000	63.976.455.729	106,47
1	Hibah	-	-	-
2	Dana Darurat	14.300.000.000	14.300.000.000	100
3	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	28.627.971.000	31.977.971.479	111,70
4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	-	-	-
5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	17.158.485.000	17.698.484.250	103,15
	Jumlah (A+B+C)	808.090.315.000	761.952.744.617	94

Sumber : DPPKAD Kab. Grobogan Th. 2008, belum diaudit BPK.

b) Target Dan Realisasi Belanja

Serapan atau realisasi belanja mencapai Rp. 829.045.985.715,- atau 87,40% dari total anggaran sebesar Rp. 948.545.225.898,- yang berarti terdapat sisa lebih sebesar Rp. 119.499.240.183,-

Serapan belanja tidak langsung mencapai Rp. 502.389.190.834,- atau 96,49% dari total anggaran sebesar Rp. 520.649.676.802,- Sedangkan serapan belanja langsung mencapai Rp. 326.656.794.881,- atau 76,34% dari total anggaran sebesar Rp. 427.895.549.096,-

Target dan realisasi belanja APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2008, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Grobogan TA. 2008

No	Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen %
1	2	3	4	5
A	Belanja Tidak Langsung	520.649.676.802	502.389.190.834	96,49
1	Belanja Pegawai	448.357.089.802	441.835.064.288	98,55
2	Belanja Bunga	2.476.000.000	641.661.259	25,92
3	Belanja Subsidi	-	-	-
4	Belanja Hibah	12.616.469.000	12.489.000.000	98,99
5	Belanja Bantuan Sosial	29.619.225.000	22.519.381.937	76,03
6	Belanja Bagi Hasil	740.738.000	740.737.100	100,00
7	Belanja Bantuan Keuangan	24.803.155.000	24.138.326.250	97,32
8	Belanja Tidak Terduga	2.037.000.000	25.020.000	1,23
B	Belanja Langsung	427.895.549.096	326.656.794.881	76,34
1	Belanja Pegawai	45.212.156.960	39.900.506.244	88,25
2	Belanja Barang dan Jasa	151.100.002.436	138.467.801.073	91,64
3	Belanja Modal	231.583.389.700	148.288.487.564	64,03
	Jumlah (A+B)	948.545.225.898	829.045.985.715	87,40

Sumber : DPPKAD Kab. Grobogan Th. 2008, belum diaudit BPK.

Penyerapan belanja langsung yang hanya mencapai 76,34% disebabkan ditundanya pembayaran biaya pemeliharaan pekerjaan sebesar 5% dari nilai kontrak untuk jenis pemeliharaan yang melebihi akhir Tahun Anggaran 2008, dan baru dibayarkan pada Tahun 2009.

Disamping itu, karena terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran, yang disebabkan gagal dalam proses lelang, tidak cukup waktu, atau secara teknis tidak dimungkinkan dilaksanakan.

c) Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah Netto terealisasi sebesar Rp. 106.342.743.561,- atau 75,71% sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Grobogan TA. 2008

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen (Rp)
1	2	3	4	5
A	Penerimaan Pembiayaan	168.751.418.898	131.135.433.102	77,71
B	Pengeluaran Pembiayaan	28.296.508.000	24.792.689.541	87,62
C	Pembiayaan Netto	140.454.910.898	106.342.743.561	75,71

Sumber : DPPKAD Kab. Grobogan Th. 2008, belum diaudit BPK.

II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

A. VISI DAN MISI

Berdasarkan visi jangka panjang 20 tahun Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka visi jangka menengah untuk 5 tahun sebagai berikut :

“Terwujudnya masyarakat Kabupaten Grobogan yang maju, mandiri, berbadan sehat dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertumpu pada keunggulan di bidang pertanian, perdagangan, industri kecil, dan pariwisata untuk mencapai kesejahteraan masyarakat lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”

Berdasarkan visi untuk 5 tahun tersebut, dan berdasarkan misi jangka panjang 20 tahun, maka **misi untuk 5 tahun mendatang** adalah :

1. Meningkatkan produksi pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, pengelolaan dan pemasarannya untuk mendukung pengembangan perdagangan dan industri kecil guna meningkatkan perekonomian daerah.
2. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya daerah, melalui penciptaan sistem perijinan yang mudah, murah dan cepat guna mendukung peningkatan investasi dan penanaman modal.
3. Meningkatkan daya tarik dan pengelolaan potensi wisata daerah.
4. Meningkatkan peran koperasi, agar benar-benar menjadi soko guru perekonomian daerah, regional dan nasional
5. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur), serta pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan olah raga.
7. Menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi dan penegakan hukum.
8. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan melalui program pemberdayaan, khususnya kaum wanita.
9. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tenang.
10. Mengenal dan memberdayakan potensi PAD dengan tetap memperhatikan kemampuan dan tidak menghambat perekonomian masyarakat.
11. Menentukan kebijakan yang akan mendorong perkembangan dunia pendidikan.
12. Mewujudkan pembangunan moral spiritual melalui bidang agama dan budaya.
13. Mengembangkan sistem informasi yang senantiasa dimutakhirkan sesuai perkembangan keadaan sebagai upaya mempromosikan daerah dan kegiatan pembangunan daerah serta perkembangan sarana komunikasi yang semakin dinamis dan canggih.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Terdapat 2 (dua) strategi pokok (*grand strategy*) yang ditempuh sebagai pengejawantahan visi dan misi yang ditetapkan, yaitu :

- 1. Penataan kembali manajemen Pemerintah Daerah**, di jabarkan ke dalam strategi-strategi khusus pembangunan sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintah, agar kinerjanya dapat profesional, jujur, mampu memimpin dan memecahkan permasalahan ekonomi, sosial dan memberikan perhatian serta pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, agar program pembangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang paling diperlukan masyarakat.
- 2. Pembangunan daerah yang dinamis untuk membangun Kabupaten Grobogan**, dijabarkan ke dalam strategi-strategi khusus :
 - a. Peningkatan pembangunan perekonomian daerah melalui peningkatan produk unggulan, peningkatan kualitas tenaga kerja, peningkatan daya saing, pengembangan jaring distribusi pemasaran.
 - b. Mengoptimalkan potensi wilayah dengan prioritas : pertanian tanaman pangan, peternakan, perkebunan dan perikanan.
 - c. Peningkatan dunia usaha melalui Usaha Kecil Menengah (UKM), Industri Kecil Menengah (IKM), dan Pariwisata dengan membuang peluang investasi untuk sektor industri menengah/sektor pertambangan.
 - d. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan dan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan biaya yang terjangkau.
 - e. Menggali berbagai potensi sumber pendanaan untuk membiayai program pembangunan, terutama infrastruktur jalan, jembatan, sarana irigasi, sarana perdagangan, pendidikan dan kesehatan.
 - f. Pengembangan dan pengendalian penggunaan kawasan pertanian hutan produksi, perkebunan dan pertambangan.
 - g. Koordinasi dan kerjasama antar kabupaten di sekitar Kabupaten Grobogan dalam penyusunan RTRW.
 - h. Pengembangan wilayah perbatasan dan pembangunan pusat desa pertumbuhan. Strategi yang ditonjolkan mengembangkan dan mengendalikan kawasan strategis.

C. PRIORITAS DAERAH

- 1. Memantapkan pembangunan infrastruktur sosial ekonomi masyarakat, khususnya jalan, jembatan dan irigasi.**

Prioritas yang perlu dilaksanakan dalam rangka memantapkan pembangunan infrastruktur meliputi :

- a. meningkatkan kualitas jalan dan jembatan kabupaten;
- b. meningkatkan kualitas pengawasan pembangunan infrastruktur;
- c. melakukan normalisasi sungai-sungai alam yang mengalami pendangkalan;
- d. melakukan perawatan sarana dan prasarana irigasi;
- e. mengembangkan sarana irigasi pedesaan;

2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan, khususnya dalam mencapai tugas wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Prioritas dalam rangka memantapkan pembangunan di bidang pendidikan adalah :

- a. menuntaskan wajar dikdas 9 tahun, dan buta aksara;
- b. memperluas dan pemeratakan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas;
- c. meningkatkan kualitas pendidikan;
- d. meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme serta kesejahteraan tenaga pendidik;
- e. memberdayakan lembaga pendidikan, baik formal maupun informal dalam pembentukan kualitas SDM berwawasan IPTEK dan IMTAQ;
- f. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
- g. meningkatkan kinerja, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan;
- h. meningkatkan minat baca masyarakat;
- i. meningkatkan kualitas perpustakaan daerah.

3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan.

Prioritas dalam rangka memantapkan pembangunan di bidang kesehatan antara lain adalah :

- a. menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat serta perbekalan kesehatan masyarakat;
- b. menumbuhkan perilaku hidup sehat ;
- c. meningkatkan sarana prasarana pelayanan kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan SDM tenaga kesehatan;
- e. meningkatkan status gizi keluarga dan masyarakat
- f. meningkatkan kesehatan lingkungan;
- g. meningkatkan pelayanan kesehatan untuk pasien miskin;
- h. meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat;
- i. meningkatkan penanganan wabah penyakit;
- j. meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

4. Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi.

Seluruh bidang pembangunan yang terkait dengan pembangunan di bidang ekonomi daerah perlu diprioritaskan, yaitu :

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) :

- a. meningkatkan daya saing usaha koperasi dan UKM dan meningkatkan akses koperasi dan UKM terhadap sumber-sumber pembiayaan dan permodalan;
- b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan koperasi;
- c. mengoptimalkan promosi dan pemasaran koperasi dan UKM;
- d. meningkatkan kemitraan antar koperasi dan UKM dengan badan usaha lainnya.

Bidang Penanaman Modal :

- a. meningkatkan daya tarik investasi;
- b. mengoptimalkan kegiatan promosi investasi dalam rangka menawarkan produk-produk unggulan, andalan dan potensial;
- c. meningkatkan fasilitasi kerjasama pengembangan investasi, baik antar pengusaha, maupun pengusaha dengan pemerintah;
- d. meningkatkan kinerja pelayanan satu atap (*one stop service*);
- e. meningkatkan penyediaan data dan informasi potensi investasi.

Bidang Perdagangan :

- a. meningkatkan kelancaran sistem distribusi barang dan jasa kebutuhan dasar masyarakat;
- b. mencegah peningkatan harga-harga kebutuhan pokok menjelang hari raya dan hari-hari besar keagamaan;
- c. mengoptimalkan kerjasama kemitraan dalam perdagangan;
- d. mengoptimalkan penyebaran dan informasi pasar kepada masyarakat;
- e. meningkatkan kemamuan SDM dalam mengelola ekspor dan impor;
- f. meningkatkan pengaturan dan pembinaan serta penyediaan tempat usaha bagi pedagang kaki lima (PKL) sesuai ketentuan yang berlaku.

Bidang Perindustrian :

- a. meningkatkan penerapan iptek dalam perindustrian daerah;
- b. meningkatkan kemampuan SDM perindustrian daerah;
- c. meningkatkan kinerja industri kecil menengah (IKM);
- d. meningkatkan jaringan kerjasama antara IKM dengan Swasta;
- e. mengembangkan pemanfaatan energi minyak jarak;
- f. mengembangkan sentra-sentra industri potensial daerah.

Bidang Pertanian dan Perkebunan :

- a. meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. meningkatkan adopsi teknologi di bidang pertanian dan perkebunan;
- c. menumbuhkembangkan kelembagaan tani;
- d. meningkatkan aksesibilitas petani pada sumber teknologi, permodalan dan pemasaran;
- e. mengendalikan serangan hama dan ppenyakit sehingga tidak merugikan petani;
- f. meningkatkan mutu produksi pertanian agar harga jualnya menjasi meningkat pula;
- g. meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga, serta keseimbangan gizi pada masyarakat;
- h. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi pangan non beras, untuk mengurangi ketergantungan akan kebutuhan beras.

Bidang Perikanan :

- a. meningkatkan kemampuan dan ketrampilan petani ikan;
- b. meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Grobogan;

- c. menanggulangi ancaman hama dan penyakit perikanan;
- d. mengembangkan industri rumah tangga pengolahan ikan sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Bidang kehutanan :

- a. meningkatkan kelembagaan dalam pembangunan hutan;
- b. menekan tingkat kerusakan hutan;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan hutan dan hasil hutan rakyat sebagai bahan baku industri maupun kebutuhan masyarakat lainnya;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan potensi masyarakat dalam mendukung pembangunan kehutanan.

Bidang energi dan sumber daya mineral :

- a. mengoptimalkan upaya pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mineral;
- b. mengoptimalkan upaya reklamasi lahan pasca penambangan untuk menekan kerusakan lingkungan;
- c. mendorong pertambangan rakyat agar memiliki ijin;
- d. mengoptimalkan regulasi pengelolaan ABT (air bawah tanah);
- e. meningkatkan kualitas SDM pengelola pertambangan rakyat;
- f. meningkatkan rasio elektrifikasi di Kab.Grobogan;
- g. mengoptimalkan perkembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif.

Bidang Pariwisata :

- a. mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata daerah;
- b. meningkatkan daya tarik potensi pariwisata daerah;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di bidang pariwisata;
- d. mengoptimalkan kegiatan promosi pariwisata daerah;
- e. meningkatkan kualitas dan kuantitas pemandu wisata daerah;
- f. meningkatkan dukungan dunia usaha untuk mendukung kegiatan wisata daerah;
- g. mengoptimalkan kerjasama antar daerah dalam mengembangkan pariwisata.

Bidang Perhubungan :

- a. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan para pemakai jalan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas angkutan jalan;
- b. mengoptimalkan pemasangan rambu-rambu jalan yang terpasang di jalan-jalan utama Kabupaten Grobogan;
- c. meningkatkan koordinasi antara pelaku usaha transportasi untuk menekan timbulnya konflik kepentingan;
- d. pembukaan jalur baru layanan transportasi angkutan umum;
- e. meningkatkan penegakan disiplin tertib berlalu lintas ;
- f. meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terhadap para penumpang.

Bidang tenaga kerja :

- a. menurunkan jumlah pengangguran terbuka dan setengah penganggur;
- b. meningkatkan layanan informasi pasar kerja (IPK);
- c. meningkatkan kualitas ketrampilan tenaga kerja;
- d. meningkatkan perlindungan terhadap tenaga kerja;
- e. meningkatkan ketersediaan data dan informasi ketenagakerjaan;
- f. meningkatkan fasilitasi terhadap AKAD (Angkatan Kerja Antar Daerah) dan AKAN (Angkatan Kerja Antar Negara).

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :

- a. menurunkan jumlah penduduk kategori miskin;
- b. meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pedesaan;
- c. meningkatkan kemampuan kader pemberdayaan masyarakat;
- d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik;
- e. meningkatkan pemanfaatan teknologi tepat guna oleh masyarakat;
- f. meningkatkan akses informasi dan komunikasi bagi masyarakat;
- g. meningkatkan pengarusutamaan penanggulangan kemiskinan dalam proses pembangunan.

Bidang Komunikasi dan informatika :

- a. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung media komunikasi dan informasi daerah;
- b. mengoptimalkan penyebaran informasi terkait dengan kebijakan pemerintah, program, maupun hasil pembangunan;
- c. meningkatkan pelayanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Grobogan;
- d. mengoptimalkan peran Lembaga Kehumasan.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, yang meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 427.895.549.096,- dan terserap sebesar Rp. 362.398.567.072,- atau 84,69% dengan uraian ringkas sebagai berikut :

A. Urusan Wajib Yang Dilaksanakan

1. URUSAN PENDIDIKAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan pada Tahun 2008 telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 33.049.977.750,- dan terealisasi sebesar 29.132.797.800,- atau 88,15% diarahakan untuk mewujudkan tercapainya Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, meningkatkan kualitas lulusan pendidikan menengah, yang siap meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan siap bersaing dalam bursa kerja, Pendidikan non formal diutamakan bagi penduduk di luar usia sekolah yang belum tamat SD atau SMP atau masih buta aksara, dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Rehab 8 RKB pada 11 SMP dan 4 MTs di 8 kecamatan, rehab 79 gedung SD dan 5 gedung MI di 19 kecamatan, rehab 1 gedung SMP dan 1 gedung MTs di 1 Kecamatan, penunangan kompetisi Bidang Studi/Mapel di tingkat kabupaten, eks karidenan dan provinsi bagi 300 siswa dan 100 guru, pemberian beasiswa bagi 2.975 siswa dari keluarga tidak mampu, penyaluran bantuan bagi 11 SD Standar Nasional di 9 kecamatan, dan pemberian subsidi bagi 27 perpustakaan di 19 SD.
- (2) Penambahan ruang kelas dan gedung SMA/SMK, serta rehab 12 gedung SMA dan 2 gedung MA di 9 kecamatan, bantuan modal pengembangan kewirausahaan siswa, penunangan kompetisi Bidang Studi, Uji Kompetensi, Terselenggaranya SMK kelas jauh, bantuan untuk SIM Perpustakaan, bantuan fasilitas penyelenggaraan pendidikan.
- (3) penuntasan Buta Aksara bagi penduduk usia 15-44 tahun penyandang buta aksara, buta angka dan buta bahasa; penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) melalui kegiatan paket A, B dan C; serta peningkatan kualitas tenaga pengajar pendidikan non formal, termasuk pengurus TPQ dan Madin.
- (4) Diklat/penataran tenaga pendidik/anak didik, dan bantuan tugas belajar bagi guru dalam rangka penyeteraan guru.
- (5) Meningkatkan peran Dewan Pendidikan, Kompetisi Olah Raga dan Seni Pelajar, pemberian bantuan Kesra bagi guru Wiyata Bakti TK/RA dan SD/MI, Seleksi Calon Kepala Sekolah serta penyusunan data pokok pendidikan yang akuntabel.
- (6) Pengelolaan sekolah fillial dan sekolah satu atap, yaitu SMP Filial dan SD SMP Satu Atap; penunangan sarana prasarana pendidikan; bantuan operasional pendidikan untuk SD se-Kabupaten; penunangan pelaksanaan BOS untuk sekolah se-Kabupaten; bantuan operasional pendidikan SMP/MTs,SMA/MA/SMK se Kab. Grobogan; pengadaan buku pendidikan Kesadaran Berkonstitusi dari Mahkamah Konstitusi.

2. URUSAN KESEHATAN

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 41.914.230.290,- dan terealisasi sebesar Rp. 40.430.002.548,- atau 96,46% diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyediaan obat operasional Puskesmas, peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas, Balai Pengobatan, Rumah Bersalin dan RS.
- (2) Peningkatan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan di Puskesmas rawat inap dan RS, pengembangan Laboratorium Puskesmas, Peningkatan Fungsi Polindes menjadi PKD (Poliklinik Kesehatan Desa), dan pembinaan Posyandu.
- (3) Pengawasan terhadap penggunaan obat dan makanan di Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS), BP/RB, Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), penyedia kosmetika dan alat-alat kesehatan (Kosalkes), Bahan Tambahan Makanan (BTM), toko penjual paket lebaran, paket natal, dan lain-lain.

- (4) Penyediaan Media Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Akselerasi Desa Siaga, Penyediaan Jasa Farmasi dan Jasa Pelayanan, dan Penyediaan Jasa Promosi.
- (5) Pembinaan Kesehatan Keluarga, serta penanggulangan gizi buruk di Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (6) Penyehatan Lingkungan Permukiman, berupa tersedianya sarana sanitasi untuk sekolah dasar dan masyarakat.
- (7) Pencegahan penyebaran penyakit menular, melalui pemberian Imunisasi kepada bayi, balita, anak-anak sekolah dasar dan wanita usia subur; Pemberantasan penyakit demam berdarah, Kusta, dan TBC; Penanggulangan Infeksi Menular Seksual (IMS)/HIV-AIDS; dan Pencegahan penyakit Avian Influenza atau Flu Burung, serta Tuberkulosis (TBC).
- (8) Perbaikan mutu pelayanan kesehatan, melalui kegiatan Akreditasi Puskesmas, dan penyusunan PERDA TARIF RSD R. Soejadti Purwodadi, pemutakhiran peralatan kedokteran, peralatan farmasi dan peralatan Laboratorium; serta meningkatkan kelengkapan peralatan/sarana prasarana rumah sakit.

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup TA. 2008 dialokasikan anggaran Rp 4.654.634.450,- terealisasi Rp 4.576.294.991,- atau 98,32% yang diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan kebersihan dengan mengembangkan paradigma menuju Kabupaten Grobogan yang bersih dan indah dengan melibatkan partisipasi publik, peningkatan pengelolaan pertamanan secara inovatif dan peningkatan sarana bermain bagi anak, mengupayakan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, menjaga kelestarian lingkungan hidup dari beban pencemaran, serta menambah diversifikasi tanaman dan bertambahnya areal hijau. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Meningkatkan kebersihan / sanitasi di kawasan ruang publik, optimalisasi pemanfaatan area/kawasan TPA, optimalisasi penanganan limbah tinja, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, dan meningkatkan ketersediaan kompos.
- (2) Meningkatkan keindahan kota Purwodadi, dan lingkungan pasar induk Purwodadi.
- (3) Meningkatkan pelayanan publik di bidang kebersihan dan pertamanan, serta meningkatkan pemahaman pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha dan pemangku kebijakan.
- (4) Terbangunnya embung, Tertanamnya bibit tanaman, terselenggaranya sosialisasi pendampingan DAK Bidang LH, penambahan luasan berpenutupan hijau, dan penyusunan data base lingkungan hidup.

4. URUSAN PEKERJAAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum tahun anggaran 2008 lebih dititik beratkan pada penanganan jalan, baik di wilayah perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya jalan-jalan yang dilalui jalur trayek angkutan.

Target percepatan pembangunan infrastruktur jalan ini adalah untuk meningkatkan lapis permukaan jalan dengan konstruksi beton bertulang tunggal dan Hotmix.

Untuk melaksanakan percepatan pembangunan tersebut Pemerintah Kabupaten telah melakukan pinjaman kepada Bank BPD Jateng sebesar Rp. 95.000.000.000,- yang digunakan untuk peningkatan jalan sepanjang 33,17 km (beton 30,43 km dan Hotmix 2,74 km), melalui 30 kegiatan.

Secara keseluruhan penyelenggaraan urusan pekerjaan umum Tahun Anggaran 2008, diimplementasikan ke dalam 13 program 358 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 194.547.161.500,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bantuan Keuangan kepada kabupaten/kota, Program Pamsimas, dan Dana Pinjaman dari BPD Jateng, dan dalam pelaksanaannya menyerap anggaran Rp. 151.891.772.642,- atau 78,07%.

Capaian kegiatan Urusan Pekerjaan Umum antara lain sebagai berikut:

- (1) Peningkatan jalan sepanjang \pm 69,39 km (meliputi beton=42 Km; beton setapak = 7,24 Km; hotmix = 9,76 Km dan telford = 10,33 Km), yang dilaksanakan melalui 107 kegiatan, dan 28 kegiatan diantaranya di biayai dari dana pinjaman, serta pembangunan 3 buah jembatan dan 4 buah gorong-gorong.
- (2) Pemeliharaan jalan sepanjang 5,58 km (meliputi hotmix = 3,1 Km dan telford = 2,48 Km); 5 buah jembatan, 1 buah gorong-gorong, serta penanganan longsor sepanjang 1153 m (di 3 lokasi), yang dilaksanakan melalui 15 kegiatan. 5 kegiatan diantaranya dilaksanakan dengan Pola pemberdayaan Masyarakat (PPM).
- (3) Rehab saluran sekunder sepanjang 21,27 km, Rehab/Pembuatan Bangunan Air sebanyak 93 buah, penanganan talud saluran 500 m, Pembuatan talang air 1 paket, penanganan longsor tanggul saluran 40 m (di 2 lokasi), pemeliharaan saluran pembawa sepanjang 98 km dan pemeliharaan bangunan air 75 buah, yang semuanya itu dilaksanakan melalui 27 kegiatan.
- (4) Perbaikan tebing/tanggul kali di 9 lokasi dengan total panjang lebih dari 1294 m, pembuatan 2 buah embung, pembuatan 1 buah siphon, perbaikan dan pembangunan 3 buah bendung, perbaikan saluran sepanjang 900 m, dan penanganan longsor avour 1 paket, yang semuanya itu ditempuh melalui 15 kegiatan.
- (5) Normalisasi avour dengan sepanjang 14,21 Km (di 7 lokasi), normalisasi kali sepanjang 20,75 Km (di 6 lokasi), normalisasi saluran sepanjang 2 Km (di 1 lokasi), serta penanganan pasca bencana alam, yang semuanya itu ditempuh melalui 15 kegiatan.
- (6) Pembangunan jalan desa sepanjang 64,88 Km (meliputi beton = 1,95 Km; beton setapak = 6,37 Km; hotmix = 0,69 Km; telford = 54,87 Km), 8 buah gorong-gorong, 21 buah jembatan, saluran sepanjang 702 m (di 3 lokasi), Perbaikan talud jembatan sepanjang 279 m (di 1 lokasi) dan penanganan air bersih melalui program Pamsimas sebanyak 5 Paket, yang semuanya itu ditempuh melalui 119 kegiatan.

- (7) Peningkatan jalan lingkungan ± 2.636 m, penataan lingkungan, yaitu lingkungan masjid, kota, pasar, perumahan dan alun-alun yang masing-masing sebanyak 1 paket, penataan trotoar sepanjang 4.014 m, pembangunan saluran/drainase 1 paket, dan pembanguan sirkuit motor 1 paket, yang semuanya itu ditempuh melalui 25 kegiatan.

5. URUSAN PENATAAN RUANG

Penyelenggaraan Urusan Penataan Ruang dialokasikan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 247.990.000,- atau 99,20% diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan mengendalikan penggunaannya. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyusunan Tata Ruang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kawasan Agropolitan sebanyak 1 paket.
- (2) Penyusunan Revisi RTRW Kabupaten Grobogan sebanyak 10 dokumen.

6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Penyelenggaraan Urusan Perencanaan Pembangunan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 4.128.532.250,- terealisasi Rp. 3.921.904.764,- atau 94,99% diarahkan untuk penyediaan data/informasi sebagai bahan perencanaan pembangunan, meningkatkan kegiatan pembangunan, upaya terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, perencanaan pembangunan bidang ekonomi, perencanaan pembangunan bidang sosial budaya, dan perencanaan pemanfaatan wilayah dan sumber daya alam, dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyusunan Indikator Kinerja dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan sebanyak 6 dokumen; Buku Sistem Informasi Profil Daerah sebanyak 20 buku; Buku Sistem Informasi Profil Daerah berbasis kecamatan sebanyak 20 buku; Profil Kawasan Karst; Peta Potensi Ekonomi Usaha Kecil Menengah; Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi; serta Evaluasi Pelaksanaan RPJMD.
- (2) Penyusunan Proposal dan Konsultasi Program Pembangunan Strategis yang diusulkan ke Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Pelaksanaan Forum Perencanaan SKPD; Musrenbangkab 2008; Penyusunan Buku Evaluasi Tahunan Dana Perimbangan Tahun 2008; Penyusunan Perubahan APBD Belanja Langsung TA. 2008 dan APBD Belanja Langsung TA. 2009; Penyusunan RPJM Bidang Keciaptakaryaan sebanyak 10 dokumen; Pembentukan dan revitalisasi kelompok pendamping lapangan di 11 DI; koordinasi pelaksanaan P2KP; Penyusunan LPPD, LKPJ, dan ILPPD Tahun 2007.
- (4) Pembinaan klaster, produk klaster dan display promosi; Penyusunan Strategi RPPK (Revitalisasi Pertanian, Peternakan dan Kehutanan); Perencanaan Pengembangan Bidang Ekonomi dan pengadaan sarana kegiatan; Penguatan kelembagaan, pembuatan booklet dan kerja sama antar FEDEP; Koordinasi, monitoring dan sosialisasi penanggulangan rokok illegal.
- (5) Penyusunan SIG Sarana dan Prasarana Pendidikan; Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD); Pelaksanaan PAMSIMAS; penyusunan rekomendasi telaah dan analisa SPM Pendidikan dan Kesehatan.

- (6) Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pasar Gubug; Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Sistem Jaringan Pipa Air Minum Ibu Kota Kecamatan (IKK) Penawangan Air Baku dari Kali Serang.

7. URUSAN PERUMAHAN

Penyelenggaraan Urusan Perumahan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 47.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 22.000.000,- atau 46,81% diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana rumah dinas dan Taman Makam Pahlawan; dan penyusunan laporan kerusakan perumahan penduduk akibat bencana alam. Dengan capaian kegiatan yaitu : rehab rumah dinas sebanyak 1 unit dan perawatan 24 nisan pada TMP, dan terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap perumahan penduduk yang rusak akibat bencana alam di 4 kecamatan (Toroh, Geyer, Pulokulon dan Brati), dengan hasil monitoring yaitu tersusunnya laporan rumah yang rusak akibat bencana banjir di Kec. Toroh, Geyer, Pulokulon dan Brati, sebanyak 180 rumah.

8. URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dialokasikan alokasi anggaran Rp. 300.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 300.000.000,- atau 100%, diarahkan untuk memupuk dan melestarikan nilai nasionalisme/patriotisme di kalangan pemuda/pelajar; pengembangan serta pemasyarakatan olah raga prestasi; meningkatkan mutu sarana dan prasarana olah raga yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dengan capaian program kegiatan : Pembinaan SDM Pemuda dan pelajar, dalam bentuk seleksi Paskibraka, SP3, Lomba Wawasan Wiyata Mandala, Pelatihan Pengurus OSIS, Upacara Haornas dan Hari Sumpah Pemuda; Pemberian bantuan klub olah raga sebanyak 10 klub; dan bantuan perlengkapan olah raga 7 macam/537 buah.

9. URUSAN PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal dialokasikan anggaran Rp. 205.000.000,- terealisasi Rp. 201.460.000 atau 98,27%, diarahkan untuk meningkatkan pangsa pasar dan jaringan UKM, dan meningkatkan sarana promosi produk unggulan; dan peningkatan manajemen usaha bagi pedagang kaki lima. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pengembangan produk unggulan daerah, dengan terlaksananya keikutsertaan UKM di Kabupaten Expo – JCC Jakarta, Pameran Jawa Tengah – Kraton Solo, dan Invesda Expo Yogyakarta – JEC Yogyakarta sebanyak 3 kali promosi.
- (2) Koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan investasi PMDN / PMA, dengan adanya MOU Pengusaha Besar dan Pengusaha kecil Menengah dengan 40 PKM.
- (3) Peningkatan kualitas SDM dengan dilaksanakannya Seminar dan Sosialisasi Peraturan Penanaman Modal kepada 30 Pengusaha.
- (4) Peningkatan cara penerapan manajemen usaha bagi 100 Pedagang Kaki Lima.

10. URUSAN KOPERASI DAN UKM

Penyelenggaran Urusan Koperasi dan UKM dialokasikan anggaran sebesar Rp. 774.084.500,- terealisasi sebesar Rp. 770.860.206,- atau 99,58% diarahkan untuk peningkatan iklim usaha KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang kondusif; pembangunan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif yang kondusif; peningkatan kualitas kelembagaan KUMKM; dan peningkatan akses sumber daya produktif. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Fasilitasi kemudahan legalitas UMKM; Sosialisasi dan pembentukan sentra/kelompok UMKM; dan Pengembangan UMKM melalui pendampingan dana sertifikasi Hak Atas Tanah.
- (2) Pemberdayaan UMKM di bidang Pemasaran dan Informasi Bisnis bagi UMKM; Peningkatan SDM KUMKM.
- (3) Penilaian kesehatan kepada 102 KSP/USP; revitalisasi kelembagaan melalui penataan organisasi dan manajemen koperasi bagi 125 koperasi; sosialisasi perkoperasian dan penyuluhan kepada 150 Koperasi; dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi melalui Verifikasi koperasi kepada 88 Koperasi; dan Temu usaha antara stake holder.
- (4) Fasilitasi Perkuatan Modal bagi KSP/USP dan UMKM; penyusunan Data Base bagi Koperasi dan Data Base di 9 (sembilan) sektor UKMKM.

11. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

Penyelenggaran Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dialokasikan anggaran Rp. 3.253.610.000,- terealisasi Rp. 2.832.540.766,- atau 87,06% diarahkan untuk menuju tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terealisasinya pemeliharaan peralatan pelayanan KK dan KTP (19 kec, 1 unit capil); Tersedianya blangko pelaporan bulanan, triwulan dan semesteran (280 desa, 19 kec); Tersedianya tenaga operator dan petugas verifikator pelayanan kk, KTP (19 kec);
- (2) Tersedianya blangko BIP, BMP, Buku Harian Peristiwa Penting dan Petugas serta Tim Penatausahaan Data penduduk (280 desa); Tersedianya blangko administrasi mutasi penduduk (4 formulir, 19 kec); Terlaksananya pelaksanaan SIAK Off Line (19 kec);
- (3) Terlaksananya sosialisasi akta kelahiran (19 kec); Tersedianya tenaga pengelola arsip (1 tahun); Tersedianya pelayanan akta kelahiran (19 kec); Terlaksananya sosialisasi Mutasi dan pengendalian penduduk (280 desa); dan Tersusunnya naskah akademik (1 paket).

12. URUSAN KETENAGAKERJAAN

Penyelenggaran Urusan Ketenagakerjaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.321.770.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.300.645.000,- atau 98,40% diarahkan untuk penyediaan data yang akurat guna pengambilan kebijakan bagi pemerintah serta sebagai upaya pemerintah untuk peningkatan kualitas sumber daya masyarakat; memberikan informasi kesempatan kerja bagi masyarakat, dan pemantauan bagi kinerja Lembaga

Penyalur Tenaga Kerja; dan memberikan pembinaan dan perlindungan tenaga kerja. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penyusunan data base ketenagakerjaan; Pelatihan kerja otomotif sepeda motor; Pelatihan kerja menjahit; Bimtek Penerapan Standart Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi Pengelola Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS); Pembuatan Proposal/Study Kelayakan BLK; dan Pembentukan Tim Penilai Kelayakan dan Kepantasan Pendirian Bursa Kerja ke Luar Negeri.
- (2) Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja; dan Pemantauan Kinerja Lembaga Penyalur Tenaga Kerja.
- (3) Pelatihan Penanggulangan Kebakaran / Evakuasi; Peningkatan Kinerja LKS Tripartit; Sosialisasi Norma Kerja; dan Pembinaan Hubungan Industrial; serta Peningkatan Kinerja Dewan Pengupahan.

13. URUSAN KETAHANAN PANGAN

Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan dialokasikan anggaran anggaran Rp. 1.197.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.172.582.000,- atau 97,96% diarahkan untuk penanganan daerah rawan pangan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Tersalurnya bantuan untuk daerah rawan pangan, berupa 1000 batang bibit mangga, 57 ekor ternak kambing, beras dan mie instan senilai 25.000.000,- serta bahan pangan bagi 600 KK miskin dan mesin-mesin pengolah hasil pertanian sebanyak 8 unit.
- (2) Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan bagi warung sekolah dan pedagang; dan pelatihan dan lomba kreasi pangan olahan di tingkat kecamatan, kabupaten dan propinsi serta tersalurnya bantuan penguatan modal untuk 20 warung sekolah dasar.
- (3) Tersalurnya bantuan pinjaman penguatan modal bagi Gapoktan Pengelola Silo; dan Tersedianya sarana pendukung bagi pembangunan Unit Pengolahan Jagung terpadu di Desa Dapurno, Kec. Wirosari berupa pembangunan kantor Silo dan bantuan pinjaman penguatan modal bagi Gapoktan Pengelola Silo.
- (4) Tersalurnya dana pembiayaan untuk pembelian gabah bagi 12 kelompok masyarakat; dan Terlaksananya tahapan penumbuhan dengan tersalurnya bantuan berupa ternak dan mesin pengolah hasil pertanian bagi 8 kelompok di 4 Desa (Desa Jambangan, Desa Rawoh, Desa Kalirejo dan Desa Sengonwetan).
- (5) Tersalurnya bantuan modal bagi pengembangan 16 lumbung pangan desa; dan terbentuknya kebun gizi di 3 desa.

14. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan anggaran Rp. 841.703.000,- terealisasi sebesar Rp. 839.852.000,- atau 99,78% diarahkan untuk penyusunan keserasian kebijakan di bidang perlindungan yang berbasis gender terhadap perempuan dan anak; strategi percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender; peningkatan sumber daya perempuan di bidang ekonomi melalui

ketrampilan; serta peningkatan kesadaran kepada setiap sektor terkait agar lebih responsif dalam memprioritaskan permasalahan gender. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terlaksananya Orientasi UU No. 23 Th. 2002, UU No. 23 Th. 2004, UU No. 13 Th. 2006, dan UU No. 21 Th. 2007 kepada 472 orang dari unsur Pengawas TK/SD, Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), dan Guru SD; Terlaksananya evaluasi kepada 75 orang petugas pengolah dan penyaji data pilah gender dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kabupaten; dan Terlaksananya Sosialisasi Gender kepada 200 orang warga binaan P2M-BG di 2 desa lokasi P2M-BG.
- (2) Terlaksananya kesadaran pengarusutamaan gender bagi 494 orang Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri dan Swasta; Terlaksananya penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada 20 orang korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT); dan Terlaksananya pembentukan sanggar anak dan remaja di 6 kecamatan dan terlaksananya pengembangan ketrampilan pembuatan makanan/minuman dari bahan lokal kepada anak dan remaja putus sekolah.
- (3) Terlaksananya operasional penyaluran bantuan tali asih kepada 950 orang tua jompo/lanjut usia yang tidak produktif di 38 desa/kelurahan di 19 kecamatan; Terselenggaranya kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di 19 kecamatan; Terlaksananya kegiatan pemberdayaan perempuan melalui peningkatan ketrampilan kepada 60 orang ibu rumah tangga pada 2 kelompok di 2 kecamatan, yaitu Kec. Brati dan Kec. Tegowanu; Terlaksananya evaluasi pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu (GSI) di 19 kecamatan; dan Terlaksananya operasional penyaluran bantuan kesejahteraan kepada 1.107 orang guru Pra Dikdas Non PNS.
- (4) Terlaksananya pembinaan tim KKJ Kecamatan sebanyak 760 orang dari 280 desa/kelurahan yang tersebar di 19 kecamatan; Terlaksananya penyaluran bantuan biaya penunjang kegiatan kepada 111 organisasi perempuan; dan Terlaksananya operasional kegiatan penyaluran dana penunjang kegiatan TP-PKK di 19 Kecamatan.

15. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

Penyelenggaraan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dialokasikan anggaran Rp. 775.500.000,- terealisasi Rp. 775.410.000,- atau 99,99% diarahkan untuk meningkatkan peserta KB baru dan aktif; meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi; meningkatkan pencapaian peserta KB baru; peningkatan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR; meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya narkoba; meningkatkan kualitas keluarga; meningkatkan kegiatan kelompok bina keluarga, dan kelompok UPPKS; dan meningkatkan kegiatan operasional BKB Posyandu PADU. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pengiriman obat, alkon dan non alkon bagi keluarga miskin di 19 kecamatan; pembinaan bagi peserta KB baru dan aktif sebanyak 43.997 orang; dan pembinaan peserta KB baru dan aktif di 19 kecamatan.
- (2) Pembinaan PIK KRR di 8 kecamatan; pelayanan terhadap 98 akseptor KB baru; pengiriman 25 peserta lomba KB/KS di tingkat provinsi;

- Penyuluhan Penanggulangan PMS di Sekolah di 4 kecamatan; Pembinaan Tumbuh Kembang Anak, di 265 kelompok BKB;
- (3) Pelatihan 285 kader Bina Keluarga; Terpenuhinya ijin industri produk bagi 22 kelompok UPPKS;
 - (4) Tersusunnya kajian pengembangan model operasional BKB Posyandu-Padu terhadap 76 kelompok; Tersusunnya data penduduk miskin Tahun 2008; dan database anak usia sekolah 7-15th kurang mampu yang tidak sekolah Tahun 2008.

16. URUSAN PERHUBUNGAN

Penyelenggaraan Urusan Perhubungan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 2.396.496.220,- terealisasi sebesar Rp. 2.278.661.484,- atau mencapai 95,09% diarahkan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana dan fasilitas perhubungan darat; meningkatkan dan merawat prasarana dan fasilitas LLA); mewujudkan pelayanan angkutan mengutamakan keselamatan, kenyamanan dan keamanan angkutan penumpang maupun angkutan barang; mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan; serta mewujudkan keamanan, ketertiban dan kelancaran berlalulintas. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Tersusunnya study pengembangan (RPJM) terminal induk Purwodadi; dan terlaksananya survey/pras design proyek-proyek fisik; pembangunan halte/shelter angkutan umum.
- (2) Terlaksananya pembangunan pangkalan truk Purwodadi; pembangunan jalur pemberangkatan 2 x 50 m², rehab pos retribusi 2 x 3 m² dan pemindahan emplasemen; dan rehab landasan terminal induk Purwodadi (lanjutan) 75 m².
- (3) Terlaksananya penertiban lalu lintas; penyuluhan kelala lintasan bagi siwa/pelajar; pemilihan dan pembinaan awak angkutan kendaraan umum teladan (AKUT) tingkat Kabupaten.
- (4) Terlaksananya pengamanan lalu lintas posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru di Terminal dan jalan-jalan protokol; mediasi rencana penyusunan kawasan tertib lalu lintas; pelatihan petugas lalu lintas di lingkungan Dishubpar ; terpasangnya rambu-rambu lalu lintas (20 RPPJ, 60 rambu-rambu); terpasangnya traffic light, appil dan counter down (1 unit; 4 unit); terpasangnya warning light 9 unit; dan pengecatan marka jalan.

17. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Penyelenggaraan Urusan Urusan Komunikasi dan Informatika dialokasikan anggaran Rp. 1.254.477.000,- terealisasi Rp. 1.201.149.500,- atau 95,75% diarahkan untuk peningkatan kelancaran komunikasi dan penyampaian informasi secara timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat serta para stakeholder bidang komunikasi; peningkatan kualitas SDM para pelaku bidang komunikasi dan informasi; sarana penyampaian informasi atas potensi daerah kepada khalayak luas melalui berbagai media massa; serta pengembangan sarana komunikasi dan informasi. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terlaksananya 4 kali sosialisasi Bakohumas; Penerbitan 10 edisi Majalah Gema Bersemi; 3 kali sosialisasi Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM);

- pemantapan protokol bagi 100 siswa/siswi SMP, SMA/SMK; rehab gedung studio Purwodadi FM; terlaksananya orientasi bidang kehumasan dan media sebanyak 45 orang
- (2) Penyebarluasan informasi pembangunan melalui siaran TV; Pembuatan 2 unit papan informasi; terlaksananya 20 kali dialog interaktif mengenai kebijakan pemerintah; dokumentasi hasil-hasil pembangunan daerah; dan pembuatan paket siaran TV sebanyak 2 paket; dan terlaksananya pengoperasian RSPD/Purwodadi FM.

18. URUSAN PERTANAHAN

Penyelenggaraan Urusan Pertanahan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.513.910.000,- terealisasi Rp. 683.383.500,- atau 45,14% diarahkan untuk penataan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan; dan memberikan kepastian hukum dan informasi pertanahan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terlaksananya pensertifikatan tanah kas desa sebanyak 100 bidang tanah di 4 lokasi yaitu Desa Cingkrong, Pulorejo, Katekan dan Desa Ngabenrejo; dan Sertifikat Massal Proda, sebanyak 200 bidang terletak di Desa Nglobar Kec. Purwodadi dan Desa Pendem Kec. Ngaringan.
- (2) Terlaksananya Pengadaan Tanah Kas Desa, sebanyak 3 bidang di Desa Tlogotirto Kec. Gabus dan Desa Ledokdawan Kec. Geyer; dan Pengadaan Tanah Aset Pemkab/Eks Bondo Deso belum bisa dilaksanakan karena masih adanya multitafsir atas peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.
- (3) Tersusunnya Daftar Inventarisasi Tanah di 3 kecamatan yaitu Kec. Godong, Toroh dan Klambu.

19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan anggaran Rp. 3.582.473.500,- terealisasi Rp. 3.511.047.500,- atau 98,01% diarahkan untuk memantapkan keamanan dan ketertiban masyarakat, pencegahan tindak pidana kriminal; mengembangkan dan meningkatkan wawasan kebangsaan; memberdayakan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan; meningkatkan pendidikan politik masyarakat; serta penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi terhadap korban bencana. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Meningkatkan pengawasan atas perda khususnya IMB, retribusi dan wajib pajak; Pembinaan Pedagang Kaki Lima Kota Purwodadi; Pengamanan Kompetisi PSSI 2008; Operasi Yustisi, Penataan Pasar Pagi Purwodadi; Pembinaan dan penataan PKL dan pedagang Pasar Godong; Pengawasan dan penertiban peredaran cukai rokok illegal; Pelatihan Keterampilan Matrik Hansip; dan Pembekalan anggota Hansip/Linmas pengamanan Pilgub Jateng Tahun 2008.
- (2) Terwujudnya Pos Pelayanan Aduan Masyarakat di Kantor Satpol PP; Terselenggaranya Forum Komunikasi Ketentraman dan Ketertiban Terpadu bagi Muspika; Rakor Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum Wilayah; Pembekalan Ketrampilan dan Kesamaptaan Polisi Pamong Praja; Pembinaan Bagi Pemilik/Pengelola Hotel, Kafe. Restoran

- dan Swalayan; Pembinaan Ketertiban Wilayah Perkotaan bagi RT/RW; dan Pengamanan Pilgub Jateng Tahun 2008.
- (3) Terlaksananya kegiatan Bakoppar bagi pemuda dan pelajar; Orientasi Wawasan Kebangsaan; sosialisasi Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah; orientasi ketahanan bangsa;
 - (4) Terlaksananya sosialisasi kewaspadaan dini masyarakat; Pelatihan ketrampilan PAM Swakarsa; Pembinaan administrasi kehansipan; kegiatan UP BKO Hansip/Linmas Pam Kampanye pemungutan suara rekapitulasi hasil Pilgub Jateng Tahun 2008.
 - (5) Terlaksananya DESK Pilgub Jawa Tengah; pelatihan Jaring Komunikasi Pilgub; sarasehan Lintas Parpol, LSM Tingkat Kecamatan.
 - (6) Terlaksananya Pemantauan dan Penyebarluasan informasi Potensi Bencana Alam kepada masyarakat; pelatihan SAR; pelatihan manajemen PBP; pelatihan Mitigasi bencana; rakor terpadu penanganan bencana; pengiriman gladi lapangan satlinmas inti; Piket PBP bagi seluruh SKPD; pelayanan penanganan bencana; bantuan bencana alam bagi para korban bencana alam.

20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSONALIA

Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian Dan Personalia dialokasikan anggaran Rp. 97.762.843.808,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.735.611.639,- atau mencapai 85,65% diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, dan kepegawaian. Dengan realisasi kegiatan antara lain:

- (1) Terlaksananya Rakor Muspida; Terlaksananya pemeriksaan reguler; khusus/AMJ kepala desa; Kormonev; pemeriksaan kasus aduan; Rakorwas dan Larwasda.
- (2) Tersusunnya 7 Perda; Tersusunnya 5 Perbup; Terlaksananya fasilitasi dan penanganan serta penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara.
- (3) Terlaksananya penegasan Batas Daerah antara Kab. Grobogan dengan Kab. Demak.
- (4) Penyaluran bantuan aspal drum kepada masyarakat; pengadaan barang/jasa; Koordinasi Pengendalian dan Monitoring Kegiatan Pembangunan; Tersusunnya buku Petunjuk Pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan;
- (5) Tersusunnya LAKIP; Analisis Jabatan; Formasi jabatan Fungsional; Raperda SOTK Perangkat Daerah; Standarisasi Indek Biaya; Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) bidang kesehatan dan Pendidikan; Tersusunnya Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- (6) Terlaksananya Rapat Koordinasi Ekuinda; kajian *good corporate governance* pada BUMD; mewujudkan peningkatan pelayanan perijinan satu pintu (One stop servive);
- (7) Tersusunnya lampiran Penjabaran APBD; intensifikasi PBB; Intensifikasi Pemungutan Pajak Daerah; Tercapainya target Retribusi Daerah;

Intensifikasi dan Ekstensifikasi Retribusi Pasar Daerah Tercapainya target pendapatan parkir dan leges.

- (8) Penyusunan RAPBD TA 2009 dan Penjabaran APBD TA. 2009; Perubahan APBD TA. 2008 dan Penjabaran Perubahan APBD TA. 2008; Pertanggungjawaban APBD Kab. Grobogan TA. 2007; Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2009.
- (9) Evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; Pemilihan Kepala Desa; dan pelatihan bagi pimpinan BPD.
- (10) Bimtek Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Desa; Pembinaan Penatausahaan Keuangan Daerah; Pembinaan Penyusunan Laporan Keuangan; Terlaksananya Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan;
- (11) Terlaksananya seleksi penerimaan CPNS; penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin dan penyelesaian permohonan; penataan sistem administrasi kenaikan gaji berkala.
- (12) Pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional; penyusunan formasi CPNS tahun 2009; kegiatan uji kesehatan bagi CPNS.

21. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dialokasikan anggaran Rp. 10.122.130.000,- dan terealisasi Rp. 9.879.340.500,- atau 97,6% diarahkan untuk memberdayakan masyarakat; meningkatkan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa; mempercepat pembangunan desa; mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan realisasi kegiatan, antara lain :

- (1) Terlaksananya Musrenbang di Kecamatan; promosi produk daerah di Propinsi Jawa Tengah; sosialisasi dan pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Terlaksananya PAP PPK Kecamatan di 231 desa pada 15 kecamatan; dan pengendalian, penyuluhan UED SP dan pengawasan UP2K.
- (3) Terlaksananya TMMD Eks 2POA kabupaten; Terwujudnya P2LDT berupa pemugaran rumah; Terlaksananya Perencanaan dan Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat; Terlaksananya pembinaan dalam rangka menunjang tersalurnya ADD/K.
- (4) Monitoring dan evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan di 40 desa; pemantauan dan pengawasan program PKPS BBM di 58 desa; pembinaan dan pemantauan P2KP; Tersalurnya dana pendampingan PNPM-PPK (Cost Sharing).

22. URUSAN SOSIAL

Penyelenggaraan Urusan Sosial dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.566.668.500,- dan terealisasi Rp. 1.559.166.460,- atau 99,52% diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan keluarga miskin; meningkatnya kemandirian para penyandang cacat; Pengembangan bakat dan ketrampilan anak terlantar; meningkatkan kemandirian panti asuhan; meningkatnya produktivitas eks PGOT dan eks. Napi serta WTS. Dengan realisasi kegiatan, antara lain :

- (1) Pemberdayaan keluarga miskin di 3 Desa; penanganan anak terlantar pada 30 panti asuhan.
- (2) Terlaksananya pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi 30 anak jalanan; terkirimnya siswa SD/MI yang bermasalah ke Panti Asuhan Kartini Tawangmangu; pengiriman kontingen Penca, 40 anak panti dan 25 Penca; peningkatan pelayanan sosial panti asuhan sebanyak 30 panti;
- (3) Terlaksananya bimbingan dan ketrampilan eks. PGOT dan eks. Napi sebanyak sebanyak 20 eks. PGOT dan 20 eks. Napi; Terlaksananya kegiatan razia WTS dan PGOT sebanyak 25 orang.

23. URUSAN KEBUDAYAAN

Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 125.000.000,- dan terealisasi Rp. 125.000.000,- atau 100% diarahkan untuk melestarikan kelangsungan kesenian tradisional. Dengan realisasi kegiatan yaitu terbinanya 25 kelompok organisasi kesenian tradisional.

24. URUSAN STATISTIK

Penyelenggaraan Urusan Statistik dialokasikan anggaran sebesar Rp. 320.000.000,- dan terealisasi Rp. 313.382.900,- atau 97,93% diarahkan untuk, menyajikan data dan informasi statistik yang dapat memberikan gambaran kondisi Kabupaten Grobogan. Dengan realisasi kegiatan :

- (1) Penyusunan Data Statistik Tahun 2007 sebanyak 8 paket, yang terdiri dari : Grobogan Dalam Angka Tahun 2007; PDRB Tahun 2007; Indek Gini Ratio Tahun 2007; Indek Harga Bahan Bangunan Tahun 2008; Profil Ketenagakerjaan Tahun 2007; buku saku DDA Tahun 2007; Kecamatan Dalam Angka Tahun 2007; Laju Inflasi Tahun 2008.
- (2) Feasibility Study penggemukan sapi; koordinasi pelaksanaan program DME (Desa Mandiri Energi).

25. URUSAN KEARSIPAN

Penyelenggaraan Urusan Kearsipan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.180.470.000,- dan terealisasi Rp. 947.960.965,- atau 80,3% diarahkan untuk pelayanan data bagi masyarakat/pengguna, cetak daftar gaji dan penyajian data kepegawaian; meningkatkan kinerja pengelola arsip. Dengan realisasi program kegiatan, antara lain :

- (1) Pengolahan data SIM gaji dan update program aplikasi gaji; design website Kab. Grobogan; terlaksananya pengolahan data rapel fungsional.
- (2) Pelatihan pengelola arsip bagi 60 orang; penyempurnaan program arsip; terbentuknya 19 desa percontohan kearsipan.

26. URUSAN PERPUSTAKAAN

Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 160.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 59.187.500,- atau 36,99% diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dan anak sekolah melalui budaya baca, dengan capaian kegiatan terlaksananya pengadaan buku fiksi dan non fiksi beserta kelengkapannya pada Perpustakaan Umum Kabupaten dan perpustakaan Mobil keliling.

B. Urusan Pilihan Yang Dilaksanakan

1. URUSAN PERTANIAN

Penyelenggaraan Urusan Pertanian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 7.845.900.400,- terealisasi Rp. 7.618.055.905,- atau 97,10% diarahkan antara lain untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan perkebunan; penanganan daerah rawan pangan; Penggunaan pupuk alternatif (organik); penyediaan sarana prasarana usaha pertanian dan perkebunan; pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular; meningkatkan produksi peternakan; serta meningkatkan pemasaran hasil produksi peternakan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Prima Tani dan Pendampingan Prima Tani; kegiatan PUAP dan P2HP di 35 desa; dan bantuan benih di 12 kecamatan; Penyaluran bantuan pinjaman penguatan modal bagi Gapoktan Pengelola Silo, bantuan dana untuk pembelian gabah bagi 12 kelompok; serta sarana pendukung Unit Pengolahan Jagung Terpadu di Desa Dapurno;
- (2) Promosi agribisnis dan gelar teknologi di 2 Lokasi; pelatihan pembuatan pupuk organik terhadap 10 Kelompok Tani;
- (3) Terlaksananya pelepasan kedelai varietas kedelai Grobogan sebanyak 1 paket dan diakuinya kedelai varietas Grobogan menjadi varietas unggul nasional;
- (4) Terlaksananya gerakan pengendalian hama tikus; wang wung; Wereng Batang Coklat; dan Pengembangan Laboratorium dan Klinik Tanaman;
- (5) Pengadaan obat-obatan hewan; dan encegahan dan Pemberantasan Penyakit Avian Influenza (Flu Burung); serta pengadaan 100 ekor Ayam Buras bagi kelompok P2MBC; Pembinaan 20 orang Pengusaha Peternakan; dan Terselenggaranya Ekspo Ternak;
- (6) Pengadaan Container Portable sebanyak 5 buah, Container Lapangan 3 buah, Container Depo 1 buah, peralatan biogas sebanyak 20 paket; serta pembuatan kompos sebanyak 10 unit, demplot PEMI dan UMMB di 10 kelompok SPIB.

2. URUSAN KEHUTANAN

Penyelenggaraan Urusan Kehutanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 877.184.000,- dan terealisasi Rp. 858.173.188,- atau 97,83% diarahkan untuk mengurangi luasan lahan kritis. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terbinanya kelompok tani Gerhan, tersusunnya RTT kegiatan RHL dan tersedianya sarana pendukung kegiatan GERHAN;
- (2) Peningkatan pengetahuan petani tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan tertanamnya bibit empon-empon;
- (3) pengembangan jarak pagar di Kabupaten Grobogan untuk mendukung terwujudnya Desa Mandiri Energi (DME); serta penanaman bibit Sukun, Mangga dan Nangka di Desa Tegalrejo Kec. Wirosari.

3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral dialokasikan anggaran sebesar Rp. 613.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 599.520.500,- atau 97,72% diarahkan untuk penerangan jalan umum

kota kecamatan serta untuk mengoptimalkan pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif; pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan dan meminimalkan angka kecelakaan kerja serta menertibkan pertambangan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pemasangan 12 titik lampu PJU di Kota Kec. Brati; 10 titik di Kota Kec. Klambu; 10 titik di Kota Kec. Geyer; 10 titik di Kota Kec. Toroh; 10 titik di Kota Kec. Gabus; 10 titik di Kota Kec. Pulokulon; 10 titik di Kota Kec. Kedungjati; 10 titik di Kota Kec. Tanggunharjo; 10 titik di Kota Kec. Karangrayung.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan potensi energi alternatif menuju terwujudnya Desa Mandiri Energi (DME).
- (3) Penyusunan Raperda tentang pengelolaan pertambangan galian C; pembinaan pertambangan tanpa ijin di 4 kecamatan; sosialisasi keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan bahan galian golongan C di 4 kecamatan.

4. URUSAN PARIWISATA

Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dialokasikan anggaran sebesar Rp 337.000.000,- dan terealisasi Rp. 281.552.000,- atau 83,55% diarahkan untuk pengembangan dan pemasaran obyek wisata serta kesenian daerah; peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana obyek wisata. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terlaksananya promosi pariwisata nusantara; pemilihan duta wisata; pengiriman duta seni; festival kesenian tradisional; parade seni budaya dalam rangka hari jadi provinsi Jawa Tengah.
- (2) Terlaksananya rehab loket, jalan setapak dan shelter di obyek wisata Bledug Kuwu; serta pembuatan area permainan anak di obyek wisata Kedungombo.

5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 775.493.700,- dan terealisasi Rp. 741.743.000,- atau 95,65% diarahkan untuk meningkatkan populasi dan produksi perikanan, serta meningkatkan pendapatan petani ikan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Penebaran Benih Ikan di perairan umum sebanyak 45.000 ekor di 5 lokasi; Pelatihan Budidaya Ikan Air Tawar dan Ikan Jenis Unggul; serta budidaya ikan air tawar;
- (2) Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI Karangrayung; serta pemeliharaan ikan di BBI yaitu BBI Karangasem dan BBI Karangrayung.

6. URUSAN PERDAGANGAN

Penyelenggaraan Urusan Perdagangan dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.516.055.500,- dan terealisasi Rp. 7.073.456.586,- atau 94,11% diarahkan untuk menjalin informasi pasar dan jejaring pasar, promosi produk industri serta meningkatkan kontak dagang pelaku usaha; pembangunan pasar; meningkatkan kerjasama kemitraan dan penguatan kelembagaan. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Pengendalian distribusi BBM; keikutsertaan kegiatan pameran Inacraft di JCC Jakarta; dan pameran Mega Jateng Fair Tahun 2008; pengelolaan Website Disperindagtam, serta terciptanya kontak dagang dengan pelaku dunia usaha luar daerah;
- (2) Rehab toko Pasar Umum Gubug; dan pemasangan penerangan listrik di lingkungan Pasar Umum Tuko; Instalasi Listrik Trafo Pembagi Daya Pasar Umum Godong.
- (3) Pembangunan tempat parkir di Pasar Kunden seluas 2000 m²; Los Pasar Hewan Kunden bagi 22 pedagang pasar; Los Latengan Pasar Umum Purwodadi bagi 22 Pedagang Kaki Lima (PKL); 10 Toko Pasar Umum Danyang; 1 unit Los Pasar Hewan Ketitang.

7. URUSAN PERINDUSTRIAN

Penyelenggaraan Urusan Perindustrian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.158.867.728,- dan terealisasi Rp. 1.094.886.728,- atau 94,48% diarahkan untuk meningkatkan pembinaan dan pelatihan aneka makanan; pembinaan industri kecil dan menengah; pembinaan teknologi industri; meningkatkan pengembangan infrastruktur kelembagaan sentra. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Terlaksananya pelatihan aneka makanan olahan dan terlaksananya monitoring dan fasilitasi pada pabrik minyak jarak;
- (2) Terlaksananya kegiatan industri penunjang TMMD, PKK, KKN, P2MBG; Terbentuknya 3 kelompok pengrajin genteng di Desa Karangasem dan Tegalsumur; Pengembalian kredit PER Indag di 5 kecamatan; Sosialisasi peraturan bidang cukai dan penanganan peredaran rokok illegal.
- (3) Terselenggaranya pelatihan dan job training industri emping melinjo; pelatihan produksi yodisasi garam; Terlaksananya pengembangan infrastruktur kelembagaan sentra.

8. URUSAN KETRANSMIGRASIAN

Penyelenggaraan Urusan Ketransmigrasian dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.526.687.000,- dan terealisasi Rp. 1.421.174.500,- atau 93,08% diarahkan untuk peningkatan taraf hidup masyarakat transmigran; dan penyiapan SDM penduduk yang akan ikut transmigrasi. Dengan realisasi kegiatan antara lain :

- (1) Kerjasama di bidang ketransmigrasian; Pemberangkatan 10 KK ke Provinsi Bengkulu; Bantuan bagi 112 KK di daerah Provinsi Jambi.
- (2) Terlaksananya sosialisasi ketransmigrasian dalam perspektif kerjasama; Pembinaan dan pembekalan calon transmigrasi.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Tahun Anggaran 2008, Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

A. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat, meliputi 5 (lima) Urusan, yaitu Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan

Ketenagakerjaan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Urusan Pertanian, dengan total anggaran sebesar Rp. 41.077.077.000,- dan terserap sebesar Rp. 40.455.891.430,- atau 98,49%. Dengan uraian sebagai berikut :

- 1) **Urusan Kesehatan**, menerima dari Departemen Kesehatan RI dan dilaksanakan oleh BP RSD Dr. Raden Soedjati dengan anggaran sebesar Rp. 8.375.500.000,- terserap sebesar Rp. 7.971.778.800,- atau 95,18% yang digunakan untuk penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar masyarakat miskin, pengadaan alata-alat kedokteran, kesehatan dan KB, serta peningkatan fasilitas sarana pada BP Dr. R. SOEDJATI.
- 2) **Urusan Pekerjaan Umum**, menerima dari Departemen Pekerjaan Umum RI dan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pengairan Kabupaten, dengan anggaran sebesar Rp. 7.918.899.000,- terserap sebesar Rp. 7.727.479.665,- atau 97,58% yang digunakan antara lain untuk pembangunan infrastruktur pedesaan di 10 desa pada 2 kecamatan, penyediaan sarana dan prasarana air bersih di 9 desa pada 9 kecamatan, pembangunan infrastruktur perkotaan di 17 desa/kelurahan, Data hasil penelusuran jaringan P3A peningkatan sumber daya manusia dan kelembagaan pengelolaan irigasi.
- 3) **Urusan Ketenagakerjaan**, menerima dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI dan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten, dengan anggaran sebesar Rp. 562.877.000,- dan terserap sebesar Rp. 556.176.000,- atau 98,81% yang digunakan untuk pemberian bantuan sarana usaha, padat karya produktif infrastruktur, penyebaran informasi bursa kerja dalam rangka pengembangan kewirausahaan, pelatihan kejuruan otomotif, komputer, salon dan menjahit/ bordir dalam upaya peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
- 4) **Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa**, menerima dari Departemen Dalam Negeri RI dan dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Kesbang dan Linmas Kabupaten dengan anggaran Rp. 13.763.550.000,- dan terserap 100% yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat di 9 kecamatan, yaitu Kecamatan Karangrayung, Geyer, Klambu, Gabus, Gubug, Tegowanu, Tanggunharjo, Pulokulon dan Wirosari.
- 5) **Urusan Pertanian**, menerima dari Departemen Pertanian RI Dinas dan dilaksanakan oleh Pertanian dan Perkebunan Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 10.456.251.000,- terserap Rp. 10.436.906.965,- atau 99,82% yang digunakan antara lain untuk pembinaan dan pengembangan kelembagaan alsintan, pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, pembinaan dan pengembangan pupuk organik, pengembangan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, pengembangan benih bermutu tanaman pangan di tingkat petani, pembinaan dan pengembangan alat dan mesin pertanian, peningkatan produktivitas kedelai, kacang hijau dan pengembangan sereal, pengawasan pupuk dan pestisida, pembinaan dan pengembangan benih tanaman pangan, serta pengelolaan air.

2. Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, meliputi 2 urusan, yaitu : Urusan Ketahanan Pangan, serta Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, dengan total anggaran Rp. 3.961.037.175,- dan terserap sebesar Rp. 3.959.237.175,- atau 99,95%.

- 1) **Urusan Ketahanan Pangan**, menerima dari Badan Bimas Ketahanan Pangan Propinsi Jawa Tengah dan Biro Perekonomian Setda Propinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh Bagian Ketahanan Pangan Setda dan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 3.500.000.000,- dan digunakan untuk pengembangan Usaha Ekonomi Pedesaan (LUPE).
- 2) **Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**, menerima dari BKKBN Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Jawa Tengah dan dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 461.037.175,- terserap sebesar Rp. 459.237.175,- atau 99,61% digunakan antara lain untuk : pembinaan dan pelayanan KB, sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR), penyuluhan bahaya Narkoba, penyakit menular seksual HIV AIDS, pemberdayaan organisasi sosial, rehabilitasi sosial terhadap WTS, dan pemberdayaan keluarga.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Grobogan melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Demak, dalam hal Penegasan Batas Daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kejelasan akan batas kewenangan wilayah administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan untuk menghindari kemungkinan adanya konflik perbatasan, serta memudahkan dalam pemetaan pembangunan maupun pengembangan wilayah.

Disamping melakukan Penegasan Batas Daerah, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga melakukan kerjasama dengan daerah-daerah lain, melalui Forum Kedungsepur dan Badan Kerjasama Kabupaten Seluruh Indonesia (BKSI).

B. Kerjasama Daerah dengan Pihak ketiga.

Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam penempatan transmigran telah melakukan kerjasama dengan 2 kabupaten lain selaku lokasi penempatan transmigran, yaitu Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan Jambi. Disamping itu, dalam penggalian/pengembangan potensi daerah telah pula dilakukan kerjasama dengan civitas akademika.

C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di daerah dilakukan dalam upaya mencapai keterpaduan, keselarasan dan keharmonisan baik di dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembinaan kemasyarakatan, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Kegiatan yang dilakukan diantaranya Forum Kemuspidaan, Sosialisasi Bidang Hukum, penyelenggaraan

Ibadah Haji, dan Kerukunan Umat Beragama, serta pensertifikatan tanah massal melalui Proda.

D. Pembinaan Batas Wilayah.

Secara demografi Kabupaten Grobogan berada di tengah 8 (delapan) Kabupaten tetangga. Di sebelah Barat dengan Kabupaten Semarang dan Demak, di sebelah Utara dengan Kabupaten Kudus, Pati dan Blora, di sebelah Timur dengan Kabupaten Blora dan di sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang, Boyolali, Sragen dan Ngawi (Provinsi Jawa Timur).

Dalam upaya menjamin adanya kejelasan batas kewenangan wilayah administrasi suatu daerah, diperlukan adanya penetapan batas daerah yang kongkret, pasti serta berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Grobogan melaksanakan penegasan Batas Wilayah dengan daerah-daerah tetangga yang berbatasan wilayah. Sampai Tahun 2008 telah dilakukan Penegasan Batas Wilayah Administratif dengan 4 (empat) kabupaten, yaitu Kabupaten Blora, Pati, Semarang dan Demak. Sedangkan dengan Kabupaten Sragen, Boyolali, dan Kudus belum dilaksanakan.

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Kabupaten Grobogan termasuk daerah yang rawan bencana, diantaranya adalah banjir, angin taufan, tanah longsor, dan kekeringan. Daerah yang sering mengalami banjir yaitu bantaran sungai Lusi, Serang, Tuntang, KB 1 dan KB 15 di Kecamatan Tegowanu.

Sementara Angin Taufan terjadi di Kecamatan Tawangharjo, Kedungjati, Penawangan, Grobogan, Tegowanu, Gubug, Toroh, Tanggunharjo, Purwodadi, Ngaringan. Sedangkan Tanah Longsor terjadi di Kecamatan Kradenan, Purwodadi, Geyer, Brati dan Wirosari; dan Kekeringan pada musim kemarau melanda di belahan wilayah timur.

Dalam hal penanganan bencana di Kabupaten Grobogan, dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap atau lebih dikenal dengan nama Siklus Bencana, yaitu:

- (1) **Pra Bencana.** Dilaksanakan peringatan dini kemungkinan terjadinya bencana, khususnya pada saat terjadinya pergantian musim; Pemberdayaan masyarakat tentang kemampuan mandiri dalam membaca karakteristik bencana dan antisipasi penanganannya; Pencegahan atau mitigasi bencana melalui penghijauan, pengerukan sedimentasi saluran, optimalisasi hamparan sungai dan tanggul.
- (2) **Saat Bencana.** Dilakukan pencarian, penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan tahapan: Pendirian tenda peleton yang difungsikan sebagai Posko, Dapur Umum, Komunikasi dan Administrasi serta PPPK disetiap penampungan; Bersama dengan unsur medis mengevakuasi korban yang perlu dibantu dengan rujukan kesehatan; Bersama dengan SKPD terakit mengupayakan kebutuhan-kebutuhan dasar para korban bencana; Pengamanan wilayah bencana yang ditinggal dalam pengungsian.
- (3) **Pasca Bencana.** Bersama dengan SKPD terkait mengadakan evaluasi, klasifikasi dalam laporan akibat bencana; Rehabilitasi dan pemulihan sarana prasarana umum/infrastruktur yang mengalami kerusakan melalui skala prioritas; Mengupayakan bantuan secara vertikal guna pembangunan infrastruktur yang tidak dapat diselesaikan oleh Kabupaten.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus.

Di Kabupaten Grobogan tidak terdapat kawasan khusus. Sementara yang ada adalah kawasan lindung sebagaimana diatur di dalam Perda No. 10 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW), yang meliputi :

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahnya, terdiri kawasan yang mempunyai kelerengan diatas 40° seluas $\pm 448,50$ Ha di Kecamatan Grobogan, Brati, Tawangharjo dan Wirosari dan kawasan resapan air yang berada di 30 Desa pada 11 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tanggunharjo, Kedungjati, Karangrayung, Penawangan, Toroh, Geyer, Pulokulon, Kradenan, Gabus, Klambu dan Grobogan.
- (2) Kawasan perlindungan setempat yang meliputi kawasan sempadan sungai seluas ± 7.265 Ha, sempadan waduk (Gambrengan, Sanggeh, Butak, Simo, Nglangon, Kenteng)seluas 149 Ha dan sempadan mata air seluas ± 1.382 Ha.
- (3) Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya seluas $\pm 206,43$ Ha yang meliputi kawasan Bledug Kuwu, Mrapen, Makam Ki Ageng Selo, Makam Ki Ageng Tarub, Goa Lawa dan Goa Macan serta Goa Urang.

G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, telah dilakukan upaya-upaya yang kondusif dengan melaksanakan koordinasi yang efektif dengan jajaran aparat keamanan, baik TNI maupun POLRI serta masyarakat itu sendiri, disamping mengefektifkan Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2005, membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

H. Hal lain-lain.

Beberapa prestasi dan penghargaan yang diperoleh Kabupaten Grobogan pada Tahun 2008, sebagai berikut :

- (1) Berdasarkan pemasukan PBB tahun 2008, baik sektor pedesaan dan perkotaan telah melampaui target SKB sebesar 125,13%. Atas realisasi capaian target PBB tersebut Kabupaten Grobogan mendapatkan insentif dari Pemerintah Pusat yang akan diterima sebagai tambahan penerimaan APBD pada Tahun Anggaran 2010.
- (2) Juara I Tingkat Provinsi, Lomba Bibit Sapi Brahman Betina An. Karsidi Desa Ngembak Kecamatan Purwodadi.
- (3) Juara I Tingkat Nasional cabang olah raga Karate dan Pencak Silat dalam Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) Tahun 2008, dan masih banyak lagi prestasi/penghargaan di tingkat regional.

PENUTUP

Demikian paparan singkat mengenai aspek-aspek kebijakan program maupun implementasinya, baik yang menyangkut permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maupun pembinaan ketertiban umum dan pembinaan kemasyarakatan sesuai tugas dan wewenang kepala daerah.


Namun kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat, serta menyelesaikan persoalan-persoalan daerah secara menyeluruh. Hal ini bukan karena kami tidak atau kurang memperhatikan aspirasi

masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada, dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat.

Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja pemerintah daerah pada tahun-tahun mendatang. Demikian juga kami sampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, dukungan dan kerjasamanya dengan baik selama ini.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan lahir dan bathin kepada kita semua untuk terus membangun Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini semakin maju, mandiri makmur, dan sejahtera. Amin.

Purwodadi, 30 Maret 2009.


BUPATI GROBOGAN

H. BAMBANG PUDJIONO, SH